



# Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Gerakan Membangun Desa Provinsi Jawa Barat

Asep Ridwan<sup>1\*</sup>, Dedi Herdiana<sup>1</sup>, Fathin Anjani Hilman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

<sup>2</sup>Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

\*Email : asepridwan968@gmail.com

## ABSTRAK

Desa menjadi ujung tombak sebuah kemajuan pembangunan, karena desa merupakan suatu daerah apabila dikelola dengan baik mampu menyumbang potensi sumber daya alam, sumber daya ekonomi sampai sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan hasil strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan program Gerbang Desa terdiri dari menentukan tujuan, menentukan jenis program dan menentukan pendekatan perencanaan program melalui *bottom up* dan *top down*. pelaksanaan program Gerbang Desa dimulai dari melaksanakan perencanaan program melalui pendekatan *bottom up* dan *top down*, menentukan lokasi program, melaksanakan pendekatan pelaksanaan dan faktor peluang dan ancaman. Hasil program Gerbang Desa adalah meningkatnya perekonomian masyarakat desa dengan adanya BUMDesa, meningkatnya kualitas dan kapabilitas aparatur desa serta meningkatnya strata desa di provinsi Jawa Barat sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

**Kata Kunci :** Strategi; Pemberdayaan Masyarakat; Gerbang Desa

## ABSTRACT

*Villages are the spearhead of development progress, because villages are areas that, if managed well, can contribute to the potential of natural resources, economic resources and*

*quality human resources, so that village community empowerment is needed. The aim of this research is to determine the planning, implementation and results of village community empowerment strategies through the Village Development Movement (Village Gate) program. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The results of this research show that the Village Gate program planning consists of determining objectives, determining the type of program and determining the program planning approach through bottom up and top down. Implementation of the Village Gate program starts from carrying out program planning using a bottom up and top down approach, determining the location of the program, implementing the implementation approach and factoring in opportunities and threats. The results of the Village Gate program are an increase in the economy of village communities with the existence of BUMDesa, an increase in the quality and capability of village officials and an increase in village strata in West Java province in accordance with the Developing Village Index (IDM).*

**Keywords :** *Strategy; Community Empowerment; Village Gate*

## **PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya tujuan pembangunan adalah untuk mencapai keadilan sosial. Bagi bangsa Indonesia tujuan pembangunan dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea empat yang menyatakan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan suatu bangsa membutuhkan aspek pokok yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Aspek sumber daya alam merupakan aset yang dimiliki suatu negara seperti kesuburan tanah, hasil hutan, hasil laut dan tambang yang dapat mempengaruhi pembangunan. Oleh karena itu, dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan diperlukan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pembangunan nasional dan daerah adalah suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa menjadi salah satu ujung tombak sebuah kemajuan pembangunan. Hal ini apabila desa dikelola dengan baik mampu menjadi penyumbang potensi sumber daya alam, sumber daya ekonomi sampai sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga diperlukan sebuah pemberdayaan masyarakat desa.

Provinsi Jawa Barat sampai saat ini terdapat 5312 desa yang tersebar di kabupaten/kota, pada tahun 2021 desa di Provinsi Jawa Barat terdiri dari 586 desa mandiri, 2102 desa maju, 2606 desa berkembang, 18 desa tertinggal dan 0 desa

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Gerakan Membangun Desa Provinsi Jawa Barat sangat tertinggal. Dengan kondisi tersebut menempatkan Provinsi Jawa Barat dalam urutan ke enam dalam Indeks Desa Membangun di Indonesia.

Adanya program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yaitu untuk mewujudkan desa yang mampu memberdayakan masyarakat dan membangun desa melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sarana prasarana desa. Program ini terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan adalah *Pertama*, Penelitian yang dilaksanakan oleh Zenal (2020) ditemukan bahwa hasil dari penelitian menunjukkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui Gebrak Indonesia adalah sebagai berikut: pertama, perencanaan pemberdayaan melalui Gebrak Indonesia terdiri dari penentuan desa binaan, survei, *social mapping*, perumusan *master plan*, dan FGD (*Focus Group Discussion*). kedua, taktik pemberdayaan masyarakat melalui Gebrak Indonesia adalah pendekatan secara personal dan interpersonal kepada masyarakat dengan tidak memberitahukan identitas sebagai sebuah organisasi. ketiga, pola pemberdayaan masyarakat melalui Gebrak Indonesia cenderung praktikal dan berfokus untuk memantik kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup dalam kemandirian. keempat, posisi Gebrak Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai fasilitator dengan memposisikan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. kelima, Gebrak Indonesia memiliki perspektif pemberdayaan masyarakat secara *bottom up*.

*Kedua*, Penelitian yang dilaksanakan oleh Safitri (2020) ditemukan bahwa hasil penelitian menunjukan strategi pemberdayaan masyarakat melalui *home industry* soun di Desa Manjung Ngawen Klaten diantaranya membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat, aksi sosial kepada masyarakat dan jaringan sosial terhadap masyarakat umum yang ingin tahu tentang *industry soun*. Sedangkan dampak pemberdayaan masyarakat melalui *home industry* terhadap masyarakat Manjung dan sekitarnya dirasa bersifat positif terhadap perubahan ekonomi masyarakat, terbukanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga, serta bersifat negatif limbah terhadap lingkungan sekitar dan perebutan karyawan.

*Ketiga*, Penelitian yang dilaksanakan oleh Jovian (2020) ditemukan bahwa dari hasil penelitian dapat disimpulkan dalam menjalankan konsep *smart village* dapat dilakukan dengan strategi membangun desa dalam kerangka optimalisasi melalui: perubahan paradigma pihak yang berkepentingan, penguatan basis komunitas, proteksi komunitas, penguatan sumber daya manusia, dan penguatan modal sosial.

Untuk membatasi apa yang akan menjadi bahasan pada penelitian ini,

dengan ini penulis merumuskan fokus penelitian yaitu bagaimana perencanaan strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat, Bagaimana pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat Desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat, Bagaimana hasil strategi pemberdayaan masyarakat Desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat.

Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Provinsi Jawa Barat yang berada di Jl. Soekarno-Hatta No.466, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena data penelitian yang dikumpulkan merupakan data deskriptif berupa kalimat, data, pernyataan atau informasi dari narasumber atau informan yang dapat menggambarkan fenomena sosial secara lebih sistematis dan utuh pada berbagai penemuan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan data dengan cara melihat buku dan jurnal, arsip serta dokumen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat yang berhubungan dengan penelitian.

## LANDASAN TEORITIS

Menurut Steinner. G & Minner. J (2002, hal.20) strategi adalah penempatan misi, penempatan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan utama organisasi akan tercapai. Marrus dalam Umar. H. (2022, hal.31) menyatakan strategi adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu "*empowerment*" yang bermakna pemberian kekuasaan. Karena *power* bukan sekadar daya tetapi juga kekuasaan, sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu tetapi juga mempunyai kuasa. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat) dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat Ariani dalam Bahri. E. S (2019, hal.11).

Menurut Aziz, R. (2010) pemberdayaan dalam perspektif dakwah islam disebut sebagai tamkiin al-Dakwah yaitu aktifitas menyeru, memotivasi, memfasilitasi, memediasi dan mengadvokasi masyarakat baik yang kaya (aghniya)

ataupun yang miskin (*fuqoro wa al-masakiin*) untuk saling menguatkan dengan perekat nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian dan kasih sayang yang tentunya diajarkan oleh Islam sehingga tumbuh kesatuan ummat (*wahdat al-ummah*) dalam perbedaan status sosial dan *income poverty*.

Chambers dalam Bahri. E. S. (2013, hal.28) mengemukakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meringankan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Subejo & Narimo dalam Bahri. E. S (2019, hal.12) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya disengaja dalam merencanakan, mengambil keputusan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki untuk memfasilitasi masyarakat lokal melalui *networking* dan *collective action* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, sosial dan ekologi. Muhtadi dan Tatam. H (2013, hal.6) pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik secara sistematis, terencana dan diarahkan.

Menurut Putnam dalam Andreas dan Savitri (2016, hal.30-32) terdapat tiga pemberdayaan dalam pendekatan pembangunan yaitu sebagai berikut, *Pertama*, Pemberdayaan dalam pendekatan Pembangunan *Bottom Up* (Level Mikro ) yaitu Perencanaan dan implementasi pembangunan dengan sistem *bottom-up* artinya adalah perencanaan yang dilakukan di mana masyarakat lebih berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam suatu jalannya program. Pendekatan *bottom-up* yaitu pendekatan pembangunan berbasis komunitas merupakan strategi yang dipercaya dalam mempromosikan model yang lebih partisipatif dalam pembangunan integritas dan sinergi yang tinggi menghasilkan kesempatan – kesempatan sosial (*social opportunity*) yang menunjukkan kepercayaan tinggi keluarga maupun umum, dengan kepentingan umum lebih mengutamakan dalam semua kegiatan sosial dan ekonomi. Pencapaian kuadran ini menunjukkan keberhasilan pembangunan secara *bottom-up* yang dicirikan oleh adanya integrasi dan hubungan baik berbagai sumberdaya dalam masyarakat dalam mendukung kesejahteraan bersama (Putnam, 2003).

*Kedua*, pemberdayaan dalam pendekatan pembangunan *top-down* (level makro) yaitu perencanaan pembangunan dengan sistem *top-down* artinya adalah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Kelebihan dari model *top-down* adalah masyarakat tidak

perlu bekerja serta memberi masukan program tersebut sudah dapat berjalan sendiri karena adanya peran pemerintah yang optimal, hasil yang dikeluarkan bisa optimal karena biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah, mengoptimalkan kinerja para pekerja di pemerintahan dalam menyelenggarakan suatu program.

*Ketiga*, pemberdayaan dalam model gabungan *bottom up* dan *top down* pembangunan yaitu pada model gabungan, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Pembangunan dengan sistem (*bottom-up* dan *top-down*) adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan program yang diinginkan oleh masyarakat serta kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga peran antara satu dengan keduanya saling berkaitan. Jika dilihat dari kekurangan serta kelebihan yang dimiliki oleh masing - masing sistem tersebut maka sistem yang dianggap paling baik adalah suatu sistem gabungan dari kedua jenis tersebut karena banyak sekali kelebihan yang terdapat didalamnya yaitu selain masyarakat mampu berkreasi dalam mengembangkan ide - ide mereka sehingga mampu berjalan beriringan bersama dengan pemerintah sesuai dengan tujuan utama yang diinginkan dalam mencapai kesuksesan dalam menjalankan suatu program.

Menurut Bintarto dalam Nurcholis, H (2011, hal.4) desa adalah perwujudan geografis dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain yang ditimbulkan oleh unsur - unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik dan kultural setempat. Kemudian menurut Siddiq dalam Fairus, A (2020, hal.10) desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah, yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, mampu berinteraksi dengan wilayah lain disekitarnya dan bermata pencaharian dibidang agraris.

Menurut Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul dan atau tradisional yang diakui dan oleh dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Gerakan Membangun Desa, program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan desa yang mandiri yaitu desa yang mampu membangun dan memberdayakan

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Gerakan Membangun Desa Provinsi Jawa Barat masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) adalah memajukan desa dan menjadikan desa mandiri dalam rangka pengentasan desa tertinggal di Provinsi Jawa Barat yaitu dengan mengumpulkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintahan desa kemudian dibantu dalam penyelesaiannya melalui bidang infrastruktur, sanitasi lingkungan, kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kualitas aparatur desa melalui program Sekolah Desa Juara. Kemudian untuk memfasilitasi program-program pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa adalah dengan menyelenggarakan program bersama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sebesar 35.377,76 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5312 desa. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 mencapai 49.316.712 jiwa atau 18,40 persen dari jumlah penduduk Indonesia. (sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023).

Secara geografis provinsi Jawa Barat terletak di pulau Jawa memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara DKI Jakarta serta menghubungkan pusat kegiatan ekonomi di bagian lain pulau Jawa yaitu provinsi Jawa Tengah. Letak geografis Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan wilayah provinsi lain dengan batas administrasi wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, sebelah timur berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia (sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023).

Permasalahan Provinsi Jawa Barat seperti laju pertumbuhan ekonomi melambat karena akibat dari adanya pandemi COVID-19, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran belum optimal dan cenderung meningkat, pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal, pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah, oleh karena itu pemerintah daerah menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas pembangunan daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).

## **Perencanaan strategi program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat**

Menurut Cangara. H (2013, hal.22) Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Silalahi, U dalam Nurdin, A (2019, hal.1) perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, informasi, financial, metode dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan.

Menurut Kessa, W (2015) dalam Mamu, H & Aydalina, R, V (2021) salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa adalah faktor perencanaan. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Menurut Purbasari et al. (2018) dalam Mamu, H & Aydalina, R, V (2021) proses perencanaan pembangunan desa dibutuhkan pengkajian keadaan desa yang merupakan proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi serta dinamika masyarakat desa. Purbasari et al. (2018) lebih lanjut menyampaikan bahwa dibutuhkan juga data desa sebagai gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

Kegiatan perencanaan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat desa yang ada di Provinsi Jawa Barat. Mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat desa adalah dengan menggunakan pendekatan *bottom up* dan *top down*, dimulai dari Musrenbang Desa sampai provinsi dengan melibatkan seluruh unsur yang ada didalam masyarakat dan instansi pemerintahan yang terkait serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat Provinsi.

Menurut Kessa, W (2015. hal.19) pemerintah desa dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Kemudian disamping itu menurut Setiawan, A, I (2012) harus adanya peran – peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya dengan kerja sama yang saling berkesinambungan dan melaksanakan tugasnya masing-masing.

*Pertama*, menentukan tujuan program, Gerakan Membangun Desa (Gerbang

Desa) memiliki tujuan untuk meningkatkan strata desa yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan melihat kebutuhan dan potensi masyarakat desa sesuai kriteria Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu dari aspek sosial, ekonomi dan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian disamping itu tujuan adanya program Gerbang Desa adalah dalam rangka memfasilitasi dan kolaborasi program – program pemberdayaan yang ada pada pemerintahan baik provinsi dan kabupaten/kota yang lokusnya ke desa di Provinsi Jawa Barat.

*Kedua*, menentukan jenis program. Menyusun sebuah program diperlukan jenis program agar tujuan yang disusun dapat terarah sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa yang ada di Provinsi Jawa Barat. Menurut Muhaimin, S & Prabowo, S, L (2009. hal. 349) program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama.

Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) ada 12 jenis program ada Satu Desa Satu BUMDes, *One Village One Company* (OVOC), Pendamping Posyandu Juara, Sekolah Desa Juara, Advokasi Juara, Desa Digital, Patriot Desa, CEO BUMDes (*Chief Executive Officer*), Desa Wisata, Sapa Warga, Mobil Siaga Kampung Juara (Maskara) dan Penguatan Infrastruktur Perdesaan yang terbagi fokus ke dalam aspek sosial, ekonomi dan ekologi dalam mewujudkan desa maju dan mandiri serta meningkatkan kualitas aparatur desa yang didukung oleh pengembangan informasi dan teknologi serta infrastruktur yang memadai serta menjadikan masyarakat Provinsi Jawa Barat yang sejahtera dan mandiri.

*Ketiga*, menentukan pendekatan perencanaan program. pendekatan perencanaan program ini sangat penting untuk mewadahi kebutuhan dan segala potensi masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat. seperti yang dikatakan oleh bapak Aip Syaifudin Khair sebagai Subbagian Perencanaan dan Pelaporan DPMD Jawa Barat mengatakan bahwa :

“Di dalam sistem pemerintahan perencanaan program itu bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan, ada yang memakai pendekatan *bottom up* dan ada yang memakai pendekatan *top down* sehingga perencanaan program dapat memfasilitasi kebutuhan dan potensi masyarakat” (Senin, 20 Juni 2022)”.

Perencanaan program ini terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan *bottom up* dan pendekatan *top down*. Perencanaan dengan pendekatan *bottom up* adalah perencanaan yang dilakukan oleh setiap unsur masyarakat yang ada di desa sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pemberdayaan dimulai dari pemberian gagasan sampai evaluasi kegiatan. Karena dalam pendekatan *bottom up* masyarakat lebih berperan aktif dan juga masyarakat yang lebih mengetahui mengenai permasalahan, kebutuhan dan potensinya. Sedangkan

perencanaan dengan pendekatan *top down* adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan lebih berperan dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sampai evaluasi kegiatan dengan melihat kebutuhan dan potensi masyarakat di setiap wilayah dan administratif desa, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Terdapat jenis program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yang menggunakan pendekatan *bottom up* dan *top down* sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Aip Syaifudin Khair sebagai Subbagian Perencanaan dan Pelaporan DPMD Jawa Barat bahwa :

“Perencanaan program yang memakai pendekatan *bottom up* itu adalah Penguatan Infrastruktur Perdesaan, sedangkan program yang memakai pendekatan *top down* itu Satu Desa Satu BUMDes, *One Village One Company* (OVOC), Pendamping Posyandu Juara, Sekolah Desa Juara, Advokasi Juara, Desa Digital, Patriot Desa, CEO BUMDes (*Chief Executive Officer*), Desa Wisata, Sapa Warga dan program Mobil Siaga Kampung Juara (Maskara)” (Senin, 20 Juni 2022).

Program yang menggunakan pendekatan *bottom up* adalah Penguatan Infrastruktur Perdesaan, kemudian program yang menggunakan pendekatan *top down* adalah program Satu Desa Satu BUMDes, *One Village One Company* (OVOC), Pendamping Posyandu Juara, Sekolah Desa Juara, Advokasi Juara, Desa Digital, Patriot Desa, CEO BUMDes (*Chief Executive Officer*), Desa Wisata, Sapa Warga dan program Mobil Siaga Kampung Juara (Maskara).

### **Pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat**

Untuk proses pelaksanaan program adalah tahap implementasi dari perencanaan dan tujuan yang sudah disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Gerakan Membangun Desa dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Jawa Barat yaitu dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu. Adapun hasil temuan peneliti mengenai pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat adalah dimulai dari pelaksanaan dari perencanaan program, menentukan lokasi pelaksanaan program, kemudian melaksanakan pendekatan pelaksanaan program dan faktor peluang dan ancaman dalam melaksanakan program.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan pelaksanaan menurut Gordon dalam Bilung, J, H, Resmawan, E & Hasanah, N (2018) adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi

program.

Menurut Hasibuan (2006: 72) mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Tahap pelaksanaan dari Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) dimulai dari perencanaan program, menentukan lokasi pelaksanaan program, melakukan upaya pendekatan pelaksanaan program dan melihat faktor peluang dan ancaman program Gerbang Desa.

*Pertama*, perencanaan program, proses perencanaan program merupakan dari penentuan pendekatan perencanaan program yang sebelumnya telah ditentukan yaitu pendekatan perencanaan *top down* dan *bottom up*. Menurut Sururi (2016) dalam Susanti, R, Suwandono, D & Mussadun (2019) perencanaan *top down* merupakan perencanaan dimana penguasaan tertinggi berada di pemerintah sebagai pemberi arahan, tanpa harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sedangkan *bottom-up* menurut Ekowati (2009) merupakan perencanaan yang berasal dari bawah menuju ke atas dengan memberikan ruang bagi para implementator untuk dapat menyesuaikan strategi yang direncanakan dengan kondisi riil yang dihadapi. Pelaksanaan perencanaan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) telah direncanakan oleh DPMD Provinsi Jawa Barat dengan pendekatan dan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa sampai Musrenbang Provinsi.

Soegiharto, S, (2019, hal.1) dalam tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka (RPJM) Desa terdapat pengkajian keadaan desa, yaitu proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian keadaan desa telah diatur dalam Permendagri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam peraturan ini disebutkan, pelaksana pengkajian keadaan desa adalah Tim Penyusun RPJM Desa. Kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi (1) Penyelarasan data desa (2) Penggalian gagasan masyarakat dan (3) Penyusunan laporan hasil pengkajian desa.

*Kedua*, menentukan lokasi pelaksanaan program, penentuan lokasi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan wilayah serta melihat kebutuhan dan potensi masyarakat akan menentukan keberhasilan sebuah program ketika pelaksanaan agar sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun. DPMD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui program Gerbang Desa. Menentukan prioritas lokasi untuk melaksanakan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yaitu dengan melihat berbagai pertimbangan seperti desa sangat tertinggal, desa

tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri, kemudian dengan melihat permasalahan yang ada di masyarakat seperti kesenjangan sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, kemiskinan serta melihat kebutuhan dan potensi masyarakat di setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan tahapan tahapan dimulai dari Desa sampai Provinsi.

*Ketiga*, upaya pendekatan pelaksanaan program. Yaitu cara untuk melaksanakan program agar masyarakat ikut serta dalam program yang akan dilaksanakan dengan melihat kebutuhan dan potensinya di setiap wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) terlebih dahulu melakukan sosialisasi program yaitu tahap awal sebelum pelaksanaan program dengan menyebarluaskan informasi terkait dengan program Gerbang Desa kepada masyarakat desa di kabupaten/kota yang akan menentukan keberhasilan program. Setelah dilakukan sosialisasi adanya program Gerbang Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat melakukan pendekatan pelaksanaan program lebih lanjut kepada masyarakat karena pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek dari upaya pembangunan dan pemberdayaan serta dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program Gerbang Desa. Pendekatan pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yaitu karena luas wilayah dan administrasi, karakteristik wilayah, kebutuhan dan potensi masyarakat di setiap wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang berbeda beda maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat melibatkan masyarakat, unsur dan kelompok yang ada di masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat ketika Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari desa sampai dengan provinsi agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).

Program Satu Desa Satu BUMDes dan *One Village One Company* (OVOC) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan BUMDes dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa yaitu bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Garut dengan malakukan inovasi launching BUMDes berbasis perbankan dan juga bekerjasama antara BUMDes se-Kabupaten Garut dengan PT. Bank Jabar Banten (BJB), PT. Pos Indonesia, BPJS Kesehatan, Bapenda Jabar, Bapenda Kabupaten Garut, Baznas dan PT. Unilever dalam melaksanakan program BUMDes berbasis perbankan yang nantinya dapat melakukan transaksi keuangan masyarakat di desa.



Gambar 1. Launching BUMDes Berbasis Perbankan.

Sumber Instagram DPMD Provinsi Jawa Barat

Kemudian untuk mendukung dalam keberlangsungan BUMdesa, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan PT. Shopee International Indonesia membagikan laptop kepada 500 BUMDes di Provinsi Jawa Barat untuk mendorong pemulihan ekonomi desa melalui pemasaran produk – produk BUMDes hingga level nasional atau bahkan level internasional serta untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia BUMDes di Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2. Pembagian Laptop kepada BUMDes.

Sumber Instagram DPMD Provinsi Jawa Barat

Program Pendamping Posyandu Juara ini sudah dijalankan sejak tahun 2021 dan salah satu program yang dilakukan adalah gerakan penurunan prevalensi stunting.



Gambar 3. Posyandu Desa.

Sumber Instagram DPMD Provinsi Jawa Barat

Program Desa Digital yang berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, salah satu pelaksanaannya terdapat di Desa Cangkingan Kabupaten Indramayu dengan digitalisasi pelayanan publik seperti pembuatan KTP Elektronik di Kantor Desa, pelayanan administrasi mandiri melalui mesin Anjungan Desa Mandiri dan juga pemasaran melalui Aplikasi Lapak Desa untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengurus administrasi serta peluang usaha di desa.



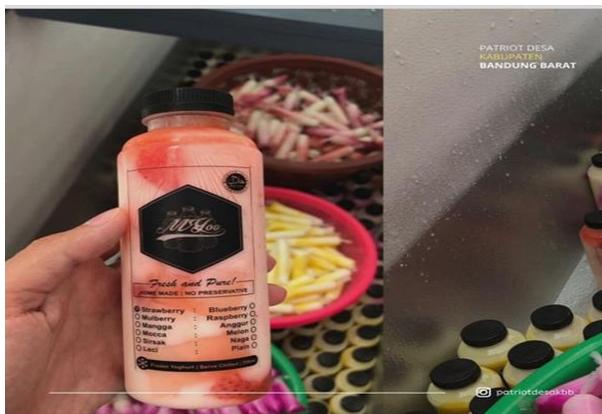
Gambar 4. Pembuatan EKTP.

Sumber Instagram DPMD Provinsi Jawa Barat

Program Patriot Desa dalam mendampingi desa melakukan pemberdayaan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi di desa yang ada di seluruh wilayah kabupaten/kota oleh pemuda provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah Patriot Desa Kabupaten Tasikmalaya ketika pelaksanaan pembekalan dan penyusunan rencana inisiatif berdasarkan rekomendasi Indeks Desa Membangun (IDM).



Gambar 5. Pembekalan dan Penyusunan IDM.  
Sumber Instagram Patriot Desa Kabupaten Tasikmalaya



Gambar 6. Promosi Yaghurt UMKM.

Sumber Instagram Patriot Desa Kabupaten Bandung Barat

Kemudian Program Patriot Desa dalam mendampingi desa dalam melakukan pemberdayaan dan pengarahan, Patriot di Desa Jambudipa Kabupaten Bandung Barat melakukan beberapa rencana dan membantu UMKM Yogurt Mayoo dengan memaksimalkan media sosial untuk promosi dan memperkuat branding yang sudah ada. Program Mobil Siaga Kampung Juara (Maskara) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pihak swasta perusahaan Astra Biz Center, program Mobil Siaga Kampung Juara (Maskara) adalah mobil multifungsi bisa digunakan untuk antar jemput warga yang sakit, acara keagamaan, panggung pernikahan, layanan bayar PBB dan berbagai kegiatan sosial serta hiburan lainnya di lingkungan desa. Seperti di Desa Cinunuk ketika mengalami zona merah COVID-19, mobil

maskara dimanfaatkan untuk penyemprotan disinfektan ke seluruh wilayah desa.

*Keempat*, faktor peluang dan Ancaman. Sumber daya alam di berbagai wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi, fokus pengembangan dan permasalahan yang berbeda – beda, terdapat sektor industri, pariwisata, agrobisnis, agrowisata dan yang lain nya dapat diwujudkan melalui optimalisasi potensi kewilayahan. Menurut Roseland (2000) dalam Harisoesyanti, K, S (2023) mengungkapkan bahwa SWOT merupakan alat perencanaan strategis yang akan membantu dalam perumusan tujuan, program aksi, dan kebijakan jangka panjang yang dapat dicapai. Kekuatan dan kelemahan merujuk pada faktor internal di masyarakat, sedangkan peluang dan ancaman merujuk pada pengaruh luar yang dapat menguntungkan atau merugikan masyarakat.

Sementara itu menurut Lohia & Muna (2018) dalam Cinthya, D, S.D, Syafrah, L & Nawangsari, E, R (2020) terdapat analisis SWOT yang meliputi (1) Strategi SO (Strength Opportunity Strategy), yaitu analisis strategi yang dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk mendapatkan dan memanfaatkan peluang yang ada dilingkungan eksternal dengan sebesarbesarnya. (2) Strategi WO (Weakness Opportunity), yaitu analisis strategi yang diterapkan untuk memperbaiki kelemahan lingkungan internal dengan memanfaatkan peluang yang ada dari lingkungan eksternal. (3) Strategi ST (Strength Threat), yaitu analisis dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari atau mengatasi ancaman yang datang dari lingkungan eksternal.

Potensi sumber daya alam setiap wilayah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat sangat beragam seperti potensi dengan wilayah industri, wisata serta didukung oleh pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) untuk kesejahteraan masyarakat desa. Tetapi peluang yang ada baik potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam tidak sepenuhnya memberikan dukungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) karena didalam setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepala daerahnya mempunyai kebijakan dan strategi pembangunannya masing – masing. Seperti penjelasan dari bapak Aip Syaifudin Khair sebagai Subbagian Perencanaan dan Pelaporan DPMD Provinsi Jawa Barat yang mengatakan bahwa :

“Ancaman nya itu kebijakan kepala daerah yang punya kebijakan dan aspek politik maka kita ngasih tau kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengenai potret desa di Provinsi Jawa Barat didalam pembangunan itu sangat beragam baik dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi” (Senin, 20 Juni 2022)”.

Peluang dan ancaman pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) adalah mengenai kebijakan kepala daerah kabupaten/kota yang

ada di provinsi Jawa Barat dan dari aspek politik didalam roda pemerintahan oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota mengenai permasalahan, kebutuhan, potensi dan juga wilayah pengembangan disetiap kabupaten/kota sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi di Provinsi Jawa Barat.

### **Hasil program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat**

Menurut Jim Ife dalam Zubaedi (2013, hal.24) keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki power (daya) sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabatnya yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Hasil program adalah keberhasilan program ketika pelaksanaan dalam mengimplementasikan perencanaan dan tujuan yang telah disusun dan ditetapkan. Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan strata desa yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan melihat kebutuhan dan potensi masyarakat desa sesuai kriteria Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu dari aspek sosial, ekonomi dan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian untuk memfasilitasi dan kolaborasi program – program pemberdayaan yang ada di pemerintahan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang lokusnya ke desa di Provinsi Jawa Barat.

Adapun hasil temuan peneliti mengenai hasil program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat adalah dimulai monitoring, evaluasi program Gerbang desa dan pencapaian program Gerbang Desa.

*Pertama*, monitoring dan evaluasi, pada tahap evaluasi ini dilakukan penilaian dan mengumpulkan informasi apakah program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan atau sebaliknya dengan meninjau faktor internal dan eksternal, pencapaian yang diraih dan mengoreksi program agar sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Marjuki & Suharto dalam Suharto, E (2010, hal.118) monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan, dengan tujuan untuk (1) mengetahui bagaimana masukan sumber – sumber dalam rencana yang digunakan (2) bagaimana kegiatan – kegiatan dalam implementasi dilaksanakan (3) apakah rentang waktu dipenuhi secara tepat atau tidak (4) apakah setiap aspek dalam perencanaan dan

implementasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan evaluasi program menurut Munthe (2015) hadir untuk memberikan masukan, kajian dan pertimbangan dalam menentukan apakah program layak untuk diteruskan atau dihentikan. Tujuan evaluasi menurut Sujiono, A (2006, hal.18) adalah (1) untuk mencari informasi atau bukti-bukti tentang sejauh mana kegiatankegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan, atau sejauhmana batas kemampuan yang telah dicapai oleh seseorang atau sebuah lembaga (2) untuk mengetahui sejauhmana efektifitas cara dan proses yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Wujud dari hasil evaluasi adalah adanya rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan (decision maker). Menurut Arikunto & Jabar (2014, hal.22) ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, yaitu (1) menghentikan program (2) merevisi program (3) melanjutkan program (4) menyebarkan program. Selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan, hasil evaluasi program tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya.

Kemudian untuk mengetahui seberapa jauh program tersebut dilaksanakan agar dapat mengetahui berbagai kekurangan dan kelebihan dari program tersebut. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menganalisis keberhasilan program berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat, Permana, C, H, A & Purnomo D (2014). Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Aip Syaifudin Khair sebagai Subbagian Perencanaan dan Pelaporan DPMD Provinsi Jawa Barat yang mengatakan bahwa :

“Dengan kita melaksanakan monitoring dan evaluasi salah satunya program Patriot Desa setiap triwulan yaitu dari bulan januari sampai dengan bulan maret atau setiap tiga bulan kita evaluasi dengan melihat bagaimana kinerja dan kesulitannya dalam melaksanakan tugas kemudian kita cari solusinya karena mereka dituntut untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang mempunyai potensi seperti pelaku usaha di desa nya dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas, apalagi program Patriot desa tersebar diseluruh Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah dan administrasinya yang berbeda – beda” (Senin, 20 Juni 2022).

Monitoring dan evaluasi program Gerbang Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) provinsi Jawa Barat yaitu dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dengan menilai perkembangan setiap program Gerbang Desa, termasuk program Patriot Desa yang dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan dari kinerja para Patriot Desa dalam menemukan penggerak lokal berdasarkan rekomendasi nilai Indeks Desa

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Gerakan Membangun Desa Provinsi Jawa Barat Membangun (IDM) masing – masing desa. Disamping itu tim pelaksana monitoring dan evaluasi juga memberikan arahan terkait rencana – rencana kolaborasi dengan *stakeholder* terkait mengenai permasalahan, kebutuhan dan potensi sesuai dengan karakteristik wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Para patriot juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan hambatan maupaun permasalahan yang dialami ketika melaksanakan tugas langsung selama tiga bulan di penempatan wilayah untuk dapat ditindaklanjuti bersama oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat.



Gambar 7. Monitoring dan Evaluasi.

Sumber Instagram Patriot Desa Kabupaten Bandung Barat



Gambar 8. Monitoring dan Evaluasi.

Sumber : Instagram Patriot Desa Kabupaten Bandung Barat

Monitoring dan evaluasi program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) provinsi Jawa Barat yaitu dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dengan menilai perkembangan setiap program Gerbang Desa, termasuk program Patriot Desa yang dilakukan monitoring dan evaluasi dengan memantau dan menilai kinerja dan hambatannya

ketika pelaksanaan tugas langsung dimasyarakat desa karena petugas Patriot Desa dituntut untuk dapat melaksanakan pemberdayaan di desa dalam meningkatkan kualitas masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi serta program Patriot Desa ini tersebar diseluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

*Kedua*, pencapaian program, pencapaian program harus didukung dengan fakta yang kuat mengenai keberhasilan apa saja yang sudah tercapai ketika pelaksanaan sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan potensi masyarakat disetiap wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana menurut bapak Aip Syaifudin Khair sebagai Subbagian Perencanaan dan Pelaporan DPMD Provinsi Jawa Barat yang mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah sampai saat ini pencapaian di Gerbang Desa dapat meningkatkan strata desa, terus juga infrastruktur desa mulai bertambah banyak dan diperbaharui, kemudian meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menurunnya angka kemiskinan dengan adanya usaha produktif dari masyarakat desa” (Senin, 20 Juni 2022”).

Pencapaian program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat adalah meningkatnya strata desa ada di Provinsi Jawa Barat yaitu desa yang sebelumnya tertinggal menjadi desa berkembang, desa berkembang menjadi desa maju serta menjadi desa mandiri dengan memperhatikan nilai - nilai lokal dan budaya, ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan di desa yang ada di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Kemudian meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan menurunnya angka kemiskinan akibat dari usaha usaha produktif masyarakat yang didampingi fresh graduate yaitu sarjana lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta di Provinsi Jawa Barat melalui program CEO BUMDesa, Patriot Desa, Satu Desa Satu BUMDes dan *One Village One Company* (OVOC).

Berdasarkan hal tersebut, indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat menurut Menurut Sumodiningrat (1999, hal.138-139) mencakup seperti berkurangnya jumlah penduduk miskin, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya, meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, semakin lebih baik sistem administrasi kelompok serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat, meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Gerakan Membangun Desa Provinsi Jawa Barat oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Pada saat ini, masyarakat desa sudah dapat mencukupi perekonomiannya sendiri dan secara tidak langsung kapasitas masyarakat sudah mulai meningkat dan juga dengan adanya BUMDes di setiap wilayah, kemudian meningkatnya kualitas dan kapabilitas aparatur desa serta meningkatnya strata desa yang ada di provinsi Jawa Barat dalam pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2022 dengan memperhatikan nilai - nilai lokal dan budaya, dengan mengelola potensi sumber daya alam yang berkelanjutan berdasarkan kriteria di dalam Indeks Desa Membangun (IDM) di desa yang ada di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1 Pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2022

No	Strata Desa	2018	2019	2020	2021	2022
1	Desa Sangat Tertinggal	48	0	0	0	0
2	Desa Tertinggal	929	326	121	18	0
3	Desa Berkembang	3603	3656	3290	2606	1671
4	Desa Maju	695	1232	1631	2102	2511
5	Desa Mandiri	37	98	270	586	1130

Pencapaian tersebut adalah salah satu bukti dari keberhasilan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan strata desa, hanya saja perlu adanya kolaborasi dan inovasi dari semua pihak termasuk kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya tentang strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa), maka ditarik kesimpulan oleh peneliti yaitu, perencanaan strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan dan potensi masyarakat desa kemudian menentukan tujuan program melalui musrenbang desa sampai provinsi, menentukan jenis program Gerbang Desa yang terbagi menjadi 12 program dan selanjutnya menentukan pendekatan perencanaan program Gerbang Desa melalui pendekatan *top down* dan *bottom up*.

Pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) provinsi Jawa Barat adalah pertama melaksanakan perencanaan program melalui pendekatan *top down* dan *bottom up*, kemudian menentukan lokasi pelaksanaan program, melaksanakan pendekatan pelaksanaan program dan faktor peluang dan ancaman ketika pelaksanaan program Gerbang Desa.

Hasil dari strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah terlebih dahulu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap jenis program ketika pelaksanaan kemudian pencapaian program mengenai keberhasilan dalam melaksanakan program yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat desa dengan adanya BUMDesa, meningkatnya kualitas dan kapabilitas aparatur desa serta meningkatnya strata desa di provinsi Jawa Barat sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Oleh karena itu program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat sudah dapat dikatakan berhasil karena telah mencapai indikator pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta sumber daya manusia di desa yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan sudah dipaparkan sebelumnya diatas, maka peneliti bermaksud memberikan beberapa saran kepada pihak terkait untuk sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk peneliti dan penelitian selanjutnya, ini hanya beberapa aspek mengenai strategi pemberdayaan masyarakat desa oleh karena itu segala kekurangan dan hal yang belum dibahas dalam penelitian ini dapat menjadi bahan untuk peneliti dan penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat mengkaji penelitian lebih dalam lagi dengan berbagai sumber dan referensi mengenai strategi pemberdayaan masyarakat desa, agar penelitian yang dihasilkan lebih baik.

Secara umum program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yang terbagi menjadi 12 program dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat cukup baik, hal tersebut dilihat dari terlaksananya beberapa program Gerbang Desa. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi perhatian peneliti diantaranya sosialisasi adanya program Gerbang desa perlu ditingkatkan kepada masyarakat umum khususnya masyarakat provinsi Jawa Barat, pendekatan pelaksanaan program melalui pendekatan *top down* dan *bottom up* lebih ditingkatkan agar masyarakat desa dapat berpartisipasi dan dapat berperan sesuai dengan fungsi sosialnya kemudian terdapat beberapa program Gerbang Desa yang sudah dilaksanakan tetapi kurang maksimal dan menyeluruh sehingga perlu

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Gerakan Membangun Desa Provinsi Jawa Barat dipertimbangkan mengenai efektifitas dan efisiensi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andreas & Savitri, E. (2016). *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial : Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir*. Pekanbaru : Penerbit.
- Arikunto, S. & Jabar, C.S.A. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Aziz, R. (2010). Dakwah dan Paradigma Pemberdayaan Masyarakat Muslim. *Ilmu Dakwah : Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(16) doi: 10.15575/idajhs.v5i16.358
- Bahri, E. S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep dan Aplikasi*. Kediri : FAM Publishing.
- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri : FAM Publishing
- Bilung, J, H, Resmawan, E & Hasanah, N (2018). Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) Melalui Program Unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No. 2*
- Cangara, H (2013). *Perencanaan dan strategi Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Cinthya, D, S.D, Syafirah, L & Nawangsari, E, R (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus UMKM Batik Teyeng Kecamatan Benowo Kota Surabaya). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik. vol 1 No. 3*.
- Fairus, Adira. (2020). *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*. Jogjakarta : Pixelindo
- Harisoesyanti, K, S (2023). Analisis SWOT Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Sentra Budi Daya Jamur Hitam. *Jurnal Ilmiah Manajemen Vol 4 No. 1*
- Hasibuan, M, S, P, (2006), *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Husein, U (2001) *Strategi Manajemen in Action*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jovian, B.Danar (2021) *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Konsep Smart Village Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang)*.
- Kessa.W. (2015) *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mamu, H & Aydalina, R, V (2021). Pengoptimalan Pelaksanaan Pembangunan Desa Melalui Pendampingan Perumusan Dokumen Perencanaan. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*. 10(3) doi : 10.37905/sibermas.v10i3.11275
- Muhaimin, S & Prabowo, S, L (2009). *Manajemen Pendidikan*, Jakarta : Kencana

- Muhtadi, M. & Tatan, H. (2013). *Manajemen Pengembangan Islam*. Tangsel : UIN Jakarta Press.
- Munthe, P, A. (2015). Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat, Tangerang, *jurnal Scholaria, Vol. 5, No. 2*
- Nurcholis. Hanif (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* : Penerbit Erlangga.
- Nurdin Ali. (2019). *Perencanaan Pendidikan Sebagai Fungsi Manajemen*. Depok : PT Rajagrafinso Persada.
- Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Gerakan Membangun Desa
- Permana, C, H, A & Purnomo D. (2014). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat : Suatu Analisis Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Sosial. Vol. 3 No. 1*
- Permendagri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Safitri, Y. A. (2020). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry Soun di Desa Manjung Ngawen Klaten*.
- Setiawan, A, I (2012). Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'u. *Jurnal Ilmu Dakwah : Academic Journal for Homiletic Studies, Vol 6 No. 2*
- Soegiharto, S (2019), *Teknik Pengkajian Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Steinner, G & Minner, J (2022) *Manajemen Strategik*, Jakarta: Erlangga.
- Suharto, E (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Sujiono, A (2006). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Susanti, R, Suwandono, D & Mussadun (2019). Proses Partisipatif Penyusunan Desain Wanita Industri Batu Bata di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. *Jurnal Pasopati (Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi). Vol 1 No. 2*
- Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023.
- Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Zenal, F. Y. (2020). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerbak Indonesia (Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia) Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Desa yang mandiri : Studi Deskriptif di Badan Semi Otonom Gebrak Indonesia ITB*, Kota Bandung, Jawa Barat.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Kencana.